Presiden Minta Badan Pengusahaan Batam Diisi Kaum Profesional

Image not found or type unknown

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Presiden Minta Badan Pengusahaan Batam Diisi Kaum Profesional

Batam, 14 Maret 2016

Presiden Joko Widodo meminta anggota Badan Pengusahaan Batam yang akan dibentuk seluruhnya diisi oleh profesional. Permintaan Presiden itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam acara "Sosialisasi Transformasi Perubahan Kebijakan Batam dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Kawasan Ekonomi Khusus, Senin (14/3), di Batam.

"Kalau bukan dari kalangan profesional, tidak akan jalan ini," kata Darmin yang juga bertindak sebagai Ketua Dewan Kawasan. Hadir dalam acara ini antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri ATR/Ketua BPN Ferry Mursidan Baldan, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Gubernur Kepri HM Sani, serta para pejabat di lingkungan Provinsi Kepri dan Kota Batam.

Menurut Darmin, Batam perlu ditata lagi karena mulai menurun kinerjanya "Bahkan tertinggal jauh dengan kawasan-kawasan yang didirikan belakangan, yang datang dari luar."

Penataan perlu dilakukan agar Batam bisa menjadi kawasan yang menjadi tulang punggung dari sebagian ekspor kita. Untuk itu, tumpang tindih kewenangan yang selama ini banyak dikeluhkan pengusaha harus dihilangkan.

Darmin menjelaskan, dalam rapat kabinet terbatas telah diputuskan bahwa Batam akan mengarah pada kawasan investasi. Masalahnya di Batam ada kawasan pemukiman di mana investasi juga terjadi.

"Di kawasan pemukiman kita tidak akan mengubah atau mengurangi fasilitas yang sudah ada, baik fasilitas kepada investasi maupun fasilitas kepada penduduk. Cuma kita ingin daerah pemukiman tidak masuk lebih luas ke kawasan investasi," jelas Darmin.

Menurut Darmin, pemerintah ingin mengembangkan Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. "Sekarang belum ke sana, karena masih transisi."

Dalam masa transisi ini, akan ada audit menyeluruh, baik terhadap aset maupun kinerja. Audit ini akan dilakukan paling lama dalam 10 hari mendatang.

"Dengan desain seperti itu, kita akan bisa berdiri tegak di hadapan negara-negara lain. Kita harus bangun Batam sebagai kawasan yang bisa dibanggakan," tegas Darmin. (ekon)

Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat

E-mail: humas.ekon@gmail.com
Twitter: @PerekonomianRI
Website: www.ekon.go.id